
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
JURNAL AKADEMIKA

<http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/akd/index>

Politik Demagogi, Matinya Kebenaran, dan Upaya Penguatan Demokrasi

Fransiskus Bala Kleden¹

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Pos-el/Phone number: franokleden@gmail.com/0822-8545-7519

Diajukan: 19 Maret 2024; **Direview:** 19 April 2024; **Diterima:** Juni 2024; **Dipublish:** Juni 2024

Abstract: *The ideals of realizing a developed and civilized nation are determined through dialectical cooperation between democratic leaders and critical citizens (people). Democratic leaders uphold the principle of truth as the main principle that builds democracy. Unfortunately, democratically elected leaders, instead of appearing as enforcers of truth, actually act as demagogues who are skilled at stirring up people's emotions and provoking public reason in order to advance their personal interests. This article attempts to elaborate the struggle between democracy and demagogue leaders. As the antithesis of democracy, demagogues appear as "the extinguishers of the fire of truth". The method used in this research is a qualitative descriptive method. The data source in research is the written words or sentences sourced from books, research results, journal articles, newspapers, magazines and also other online sources. Based on the research results, it was found that, in the history of the demagogic politics, efforts to strengthen democracy are an absolute requirement. To restore the spirit of democracy, the citizens must come forward to counter the demagogue leaders by training and instilling a spirit of critical thinking and awareness, resisting fictional narratives with the truth, giving praise to the real democratic leaders, and fighting self-ignorance.*

Keywords: leader, demagogue, democracy, people, civility.

Abstrak: *Cita-cita mewujudkan bangsa yang maju dan beradab ditentukan melalui kerja sama dialektis antara pemimpin demokratis dan rakyat warga negara (rakyat) yang kritis. Pemimpin demokrasi menjunjung prinsip kebenaran sebagai prinsip utama yang membangun demokrasi. Namun sayang, para pemimpin yang dipilih secara demokratis, alih-alih tampil sebagai penegak kebenaran, justru bertindak sebagai demagog yang terampil menggugah emosi masyarakat dan memprovokasi nalar publik demi memajukan kepentingan pribadinya. Artikel ini mencoba menguraikan pergumulan antara pemimpin demokrasi dan demagog. Sebagai antitesis demokrasi, para demagog tampil sebagai "pemadam api kebenaran". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata atau kalimat tertulis yang bersumber dari buku, hasil penelitian, artikel jurnal, surat kabar, majalah dan juga sumber online lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam sejarah politik demagog, upaya penguatan demokrasi merupakan syarat mutlak. Untuk mengembalikan semangat demokrasi, masyarakat harus maju melawan para pemimpin demagog dengan melatih dan menanamkan semangat berpikir kritis dan kesadaran, menolak narasi-narasi fiktif dengan kebenaran, memberikan pujian kepada pemimpin yang benar-benar demokratis, serta melawan ketidaktahuan diri.*

Kata-kata kunci: pemimpin, demagog, demokrasi, rakyat, keadaban.

1. Pendahuluan

Fondasi demokrasi bangsa Indonesia ditentukan oleh keadaban publik (*public civility*)¹. Tanpa fondasi ini, cita-cita pasca-kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, beradab, bermartabat dan terhormat tidak akan mungkin diraih. Sayangnya, keadaban yang seharusnya menjadi pilar penopang bangsa ini ambruk terpuruk menjadi sekadar pembenar akibat tindak-tanduk penguasa. Sebagai imbasnya, makna demokrasi menjadi semakin keruh: bukan lagi sebagai keutamaan kedaulatan warga, melainkan sebagai hasil tarik ulur kepentingan yang berkuasa.² Demokrasi hanya tampil sebagai *power game* yang tidak luput dari insting atau nafsu kekuasaan dari manusia. Padahal, dalam demokrasi, muara dari seluruh kekuasaan adalah tercapainya kebaikan bersama (*bonum commune*).³

Patut diakui bahwa keadaban publik yang menjadi kriteria kemantapan demokrasi bangsa makin merosot telanjang belakangan ini. Pemilu 2024 menjadi episentrum soal keadaban ini. Dukungan politik kekuasaan memenangkan Prabowo-Gibran hanya dalam satu putaran. Tentang ini, *Tempo* menulis sebuah ajakan sinis-pragmatis bahwa para despot⁴ yang ingin membajak demokrasi bisa belajar dari Presiden Joko Widodo yang sukses menjadi pelakon inti dalam usaha mendesain kecurangan secara terstruktur dan sistematis pada pemilihan presiden 14 Februari 2024. Di tangan Jokowi, konstitusi ditekuk untuk melegitimasi kecurangan.⁵ Kedua kandidat lain yang kalah, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menentang kemenangan tersebut dan mengklaim bahwa Jokowi dan pemerintahannya telah melakukan campur tangan yang tidak adil dalam pemilu. Namun, hasilnya tidak berubah mengingat besarnya margin kemenangan dan bukti adanya kecurangan dalam pemungutan suara yang tidak banyak.⁶

Meskipun dipilih secara demokratis, banyak pemimpin rakyat begitu terang-benderang menunjukkan sikap anti-demokratisnya. Tidak hanya presiden Jokowi, dinamika politik Indonesia menampilkan para politikus sebagai demagog-demagog tanah air yang menonjolkan ketiadaan etika dalam berpolitik. Para politikus ini memainkan peran yang apik dalam kampanye politik, retorika publik, ataupun strategi politik lainnya. Parahnya lagi, mereka memakai retorika yang memprovokasi emosi, janji-janji populis yang tidak realistis, penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat, serta memanfaatkan isu-isu identitas atau perpecahan sosial untuk mendapatkan dukungan politik.

¹ Keadaban publik (*public civility*) adalah sikap atau perilaku yang menghargai, menghormati dan peduli dengan orang lain, taat pada aturan dan norma sosial serta menerapkan dan melakukannya dalam hubungan sosial dengan orang lain dan dalam kehidupan publik (masyarakat). Keadaban publik adalah ciri masyarakat yang maju dan terdidik. Ia bukan hanya sekadar menyangkut tingkat pendidikan atau ketaatan dalam beragama, melainkan berkaitan juga dengan mentalitas dan budaya serta komitmen dalam menginternalisasikan nilai kebaikan, nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibedah lebih jauh, keadaban publik itu mengandaikan tiga unsur. *Pertama*, sikap hormat dan rasa cinta terhadap sesama warga negara yang melibatkan bentuk komunikasi penuh pengertian. *Kedua*, rasa empati yang mendorong menjadi warga negara kompeten, artinya mampu memahami hak-haknya dan hak-hak sesamanya untuk bisa memperjuangkan dengan mengorganisasi diri. Dan *ketiga*, kerelaan untuk mengorbankan diri atau kemampuan mengatur diri. Keadaban publik mengandaikan kemampuan mengendalikan diri untuk tidak hanya mencari kepentingan diri demi menjaga harmoni masyarakat. Haryatmoko, "Politik Identitas dan Keadaban Publik" (opini), dalam *Kompas*, 6 Desember 2022, hlm. 6.

² Yanuar Nugroho, "Ambruknya Keadaban Publik Kita" (opini), dalam *Kompas*, 6 Maret 2024, hlm. 6.

³ Thomas Tokan Pureklolon, "Kekuasaan, Keadilan, dan Partai Politik" (opini), dalam *Media Indonesia*, 5 Maret 2024, hlm. 11.

⁴ Despot adalah penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hati. Ia diindetikkan sebagai kepala negara atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme, atau diktatorisme. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 258.

⁵ Laporan Majalah *Tempo* edisi 18 Februari 2024, hlm. 14.

⁶ Margaret Scott, "Indonesia's Corrupted Democracy", dalam *The New York Review of Books*, 4 April 2024.

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan secara terbuka bahwa topik tentang demagog sebetulnya sudah lama mencuat dalam literatur-literatur publik. Jauh sebelumnya, pada tahun 1997, Mahfud MD dalam tulisannya bertajuk “Dominasi Kaum Demagog” di Majalah GATRA sudah secara blak-blakan menyebut para demagog sebagai agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal motivasi perjuangan itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih, tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat. Kedudukan politik yang mengatasnamakan rakyat sering melegitimasi mereka untuk mengeruk keuntungan.⁷

Dalam kaitannya dengan demokrasi, Mikhael Dua dalam artikelnya berjudul “*Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog*” (2009) pernah membahas pertanyaan tentang hubungan antara demokrasi dan para demagog. Dengan mengikuti pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arendt yang berfokus pada persoalan hakikat politik, Mikhael mengemukakan gagasan bahwa konstitusi demokrasi harus dikembangkan menjadi konstitusi kebebasan rakyat rakyat.⁸ Sejalan dengan ini, penelitian Andreas Doweng Bolo berjudul “*Masyarakat Jejaring (Network Society) Sebuah Upaya Penguatan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilihan Umum 2024*” (2023) secara spesifik membahas pertanyaan mendasar: mengapa muncul model kampanye berbasis hoaks yang menjadi lahan subur politik demagogi? Dalam refleksinya, Bolo menyimpulkan bahwa fenomena ini lahir dari suatu naluri purba dalam diri manusia yakni kebencian.⁹ Kajian tentang kejahatan politik demagogi juga dianalisis Masnun Tahir. Melalui artikelnya bertajuk “*Demagogi dan Kekerasan Agama dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*” (2011), Tahir mengungkapkan bahwa sistem demokrasi Indonesia menjadi rusak dan harus ditata ulang sebab para politisi menjadi demagog dengan menaburkan nilai-nilai agama yang tidak diamalkan. Hal ini disebabkan oleh anggapan kelompok radikal bahwa para penguasa telah melecehkan agama dan layak dijatuhkan dalam cara apapun.¹⁰

Walaupun membahas tentang tema yang sama (demokrasi dan demagogi), artikel ini memiliki sisi tilik yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah diulas di atas. Artikel ini secara khusus menunjukkan pengaruh pemimpin demagog dalam sistem demokrasi, secara khusus dengan menyoal peran apik dan kontroversial dari sang demagog dalam mematikan api kebenaran sebagai prinsip utama demokrasi. Selanjutnya, tulisan ini berikhtiar memetakan “pertarungan” antarkeduanya (rakyat sebagai pemimpin demokrasi *versus* demagog), dan ditutup dengan solusi penguatan demokrasi sebagai upaya dalam melawan pemimpin demagog.

2. Pergumulan Abadi antara Demokrasi dan Sang Demagog

Pertanyaan paling fundamental berkaitan dengan pemerintahan demokrasi adalah: “Bagaimana kita membangun demokrasi sambil mengikutsertakan rakyat untuk berpikir bersama pemerintah tentang perbaikan nasib mereka?” Jikalau masyarakat dihadapkan dengan pertanyaan semacam ini, sebuah jawaban yang tepat sasaran dan mendalam tidak akan bisa ditemukan kecuali masyarakat lebih dahulu

⁷ Analisis Prof. Mahfud MD ini dipublikasikan kembali dalam *Warta Timur*, 11 Januari 2014.

⁸ Mikhael Dua, “Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog”, dalam *Jurnal Etika Sosial Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, 14:1 (Jakarta: 2009), hlm. 23-44.

⁹ Andreas Doweng Bolo, “Masyarakat Jejaring (*Network Society*) Sebuah Upaya Penguatan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilihan Umum 2024”, dalam *Jurnal Pembumian Pancasila*, 3:1 (Jagakarsa: 2023), hlm. 41-52.

¹⁰ Masnun Tahir, “Demagogi dan Kekerasan Agama dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, dalam *Analisis*, 11:1 (Juni 2011), hlm. 175-188.

memiliki pemahaman yang mendalam tentang pergumulan abadi antara demokrasi dan sang demagog. Maka, penjelasan dalam rangka menjawab pertanyaan di atas dimulai dengan memetakan secara serius pengertian demokrasi dan demagog yang dilanjutkan dengan membeberkan hubungan antara keduanya.

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan hak kepada warga (*demos*) untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan. Dalam demokrasi, setiap warga memiliki hak-hak yang sama.¹¹ Berbeda dari monarki dan oligarki yang memberikan kekuasaan kepada sekelompok orang kaya, demokrasi merupakan sebuah sistem sosial dan politik yang memberikan tempat bagi hak rakyat untuk membuat keputusan. Demokrasi tidak memperkenankan adanya diskriminasi dalam distribusi kesempatan berpendapat dan menyatakan pendapat.¹² Ini penting sebab roh demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kinerja para pemimpin dipantau oleh rakyat, dan semuanya itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat.¹³

Namun, sejarah demokrasi seakan-akan tidak pernah terpisah dari kehadiran sang demagog. Seorang demagog dapat diidentifikasi secara sederhana sebagai tokoh politik yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin massa yang tanpa ragu-ragu mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dengan cara-cara yang ekstrem.¹⁴ Mereka selalu berbicara tentang tuntutan kemanusiaan untuk kebebasan, tapi dalam kenyataannya justru mengabaikan kebebasan itu sendiri. Trias Kuncahyono mendefinisikan demagog sebagai orang yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Seorang demagog akan meyakinkan pendengarnya bahwa ia berpikir dan merasa seperti mereka. Ia tidak akan menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataannya mengalir bersama dengan para pendengarnya.¹⁵ Sang demagog akan tampil sebagai seorang yang bijak dan berwibawa serta berusaha mempengaruhi massa dengan membangun kelenturan wacana.¹⁶

Sudah sejak awal (hingga kekal), pertarungan antara demagog dan rakyat (pemilik demokrasi) berjalan. Demagog sudah dikenal sebagai simbol dari pelaku politik dewasa ini yang membawa demokrasi ke arah yang tidak seharusnya. Hasutan dan trik jitu yang dibuatnya menjadi cara normal yang ditampilkan di depan umum.¹⁷ Betapapun demikian, jika dipandang lebih jauh, fenomena “demagog” adalah juga fenomena demokrasi. Jika demokrasi dilihat sebagai suatu modal yang menentukan dalam usaha untuk lolos dari tragedi kemanusiaan, maka sejarah demagog membuka pintu lebar-lebar untuk memahami paradoks kemanusiaan tersebut. Demokrasi dan demagog seakan-akan berjalan bergandengan. Semakin kita mengembangkan demokrasi, semakin intens pula sang demagog menemukan caranya untuk menunjukkan peranannya.¹⁸

¹¹ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika* (Jakarta: Penerbit OBOR, 1997), hlm. 26

¹² Paul Budi Kleden, “Pemilu 2009 dan Upaya Demokratisasi”, *Jurnal Ledelaro*, 7:2 (Ledalero: Desember 2008), hlm. 101.

¹³ Reza A. A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016), hlm. 11.

¹⁴ Michael Signer, *Demagogue: The Fight to Save Democracy from its Worst Enemies* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 21.

¹⁵ Trias Kuncahyono, “Agitator bin Demagog” (*opini*), dalam *Kompas*, 24 September 2019, hlm. 6.

¹⁶ Kelenturan wacana ini dibangun melalui khazanah politik yang ambigu supaya kata yang sama bisa ditafsirkan sesuai dengan harapan pendengarnya. Dalam wacana politik, demagogi bertujuan untuk “mengobok-obok”, memancing dan mengeksploitasi hasrat serta perasaan massa dalam rupa kebohongan, kemunafikan, manipulasi dan provokasi. Dengan bahasa yang lebih tegas, demagogi adalah wacana manipulatif dan penuh kebencian. *Ibid.*

¹⁷ Roberts-Miller, *Demagoguery and Democracy* (New York: The Experiment, 2017), hlm. 2.

¹⁸ Mikhael Dua, *op. cit.*, hlm. 28.

Meskipun demokrasi dan demagog berjalan bergandengan, keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Kehadiran sang demagog dapat membuat demokrasi yang menjunjung tinggi martabat manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri. Dalam bahasa lain, demagog merupakan antitesis dari demokrasi: ketika demagog muncul, demokrasi mengalami stagnan, dan bahkan menggiring demokrasi ke ambang kehancuran. Fenomena demagog adalah pratanda bahwa rakyat tidak lagi menggunakan kebebasannya untuk memilih pemimpin yang akan menjamin kebebasan, melainkan bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada seorang pemimpin yang akan menjadikan mereka hamba.¹⁹ Karena itu, pertanyaan abadi yang muncul adalah bagaimana membuat demokrasi tetap hidup dan berkembang di saat sang demagog yang memiliki kelihaian komunikasi politik terus memainkan peran utama?

3. Kekuasaan Demagog: Defisit Demokrasi dan Matinya Kebenaran

Demokrasi yang bergulir di negara ini, khususnya di perhelatan-perhelatan pemilu, hanya menjadikan rakyat sebagai “bilangan suara”.²⁰ Setelah masa Orde Baru berakhir, pemilu dengan spirit yang lebih demokratis diadakan kembali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Enam kali pemilu yang telah diselenggarakan di era reformasi ini memberi gambaran tersendiri tentang praktik sosial demokrasi di Indonesia.²¹ Rakyat diperlukan saat pemilu, bahkan dibeli dengan uang, tetapi kemudian dicampakkan ketika mereka bersuara menuntut keadilan. Demokrasi selanjutnya hanya menjadi panggung politiknya para elite negara, padahal hak-hak komunikatif rakyat terlaksana terutama dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan dengan inklusif sambil mempersoalkan segala tema yang relevan.²²

Kenyataan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam diskursus seputar demokrasi, para elite negara khususnya elite partai politik seolah-olah “mempertuhankan” demokrasi dan menjustifikasi orang-orang yang tidak berdemokrasi. Mereka dicap sebagai kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara, dan oleh karena itu, harus disingkirkan. Di sini semakin jelas bahwa demokrasi yang mengusung isu mengutamakan aspirasi rakyat mengalami defisit sebab dalam praktiknya ia seringkali menjadi alat legitimasi kepentingan elite yang berkuasa.²³ Kebenaran sebagai pilar dasar yang menopang tubuh demokrasi mati ditelan oleh model pemimpin seperti ini.

Eksistensi pemimpin dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Pemimpin, dalam ruang dan waktu apapun, senantiasa berikhtiar menegakkan kebenaran melalui komunikasi dan tindakan-tindakan politiknya. Pada taraf ini, seorang pemimpin hanya benar-benar disebut pemimpin jikalau ia terus-menerus memperjuangkan kebenaran yang sedang rawan dipelintir oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Namun, perlu diingat bahwa dalam demokrasi, kebenaran tidak hanya dimengerti secara epistemologis sebagai bagian penalaran dan penyelidikan akan suatu faktum politik. Kebenaran juga merupakan kategori etis yang berbicara tentang penghayatan hidup politik yang benar. Dengan demikian, tugas seorang pemimpin tidaklah sebatas melestarikan kebenaran pada

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29.

²⁰ Mohammad Mulyadi, *Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 29.

²¹ Andreas Doweng Bolo, *op. cit.*, hlm. 42.

²² F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 133.

²³ Mohammad Mulyadi, *loc. cit.*

tataran epistemologis, tetapi juga berusaha menghayati tugas kepemimpinannya secara benar demi misi mulia terciptanya kebaikan bersama.

Sayang, defisitnya demokrasi membuat makna demokrasi turut berubah. Demokrasi telah menjadi industri di mana siapapun yang kaya bisa menjadi pemimpin asalkan punya uang.²⁴ Wajar saja kalau banyak pemimpin politik negeri yang memegang jabatan penting lahir dari sebuah demokrasi yang transaksional seperti ini. Kehadiran pemimpin demagog sendiri bisa mengancam stabilitas politik sebab yang ditampilkan demagog ke permukaan adalah “moralitas artifisial” yang lebih banyak mengecoh masyarakat. Pemimpin demagog seolah-olah mendadak jadi orang baik, menunjukkan dirinya sebagai orang bermoral²⁵, rapi menutupi cacat celahnya, dan tampil *sok* peduli pada masyarakat yang dipimpinnya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kerap, moralitas palsu ini menjadi topeng yang dikenakan untuk menutupi kemunafikan dan kebobrokan dirinya.

Pada taraf yang lebih ekstrem, seorang pemimpin demagog akan cenderung bersikap tiran karena hubungannya yang begitu dekat dengan rakyat sehingga rakyat dijadikan sebagai massa yang tak dapat berpikir kritis lagi. Ketika rakyat kehilangan kemampuan berpikir kritis, di situ pemimpin demagog akan melancarkan kebijakan-kebijakannya. Rakyat akan didikte dan dibuat patuh padanya. Defisit demokrasi pun terjadi karena para demagog memelintir kebohongan secara terus-menerus hingga dipercaya sebagai kebenaran.²⁶ Itulah sebabnya para demagog selalu berusaha untuk mengkooptasi, merendahkan, dan menghindari kerangka dan mekanisme kerja lembaga-lembaga masyarakat yang menopang demokrasi.²⁷

Sebagai orang-orang cerdik, demagog menuntun masyarakat dengan rasionalisasi untuk merusakkan kebenaran sehingga kesalahan dapat disembunyikan secara bebas.²⁸ Demagog menggantungkan dirinya pada bahasa dengan tujuan merebut hati sebanyak mungkin orang. Bahasanya yang memikat mampu menyederhanakan segala macam persoalan kompleks, tetapi membawa orang-orang menuju absurditas.²⁹ Segala program dan keputusan bersama akan bermuara pada semata-mata pemenuhan kepentingan pribadinya. Di sana, rakyat tidak lagi diberi ruang dan kebebasan untuk beraspirasi dan menentukan pilihannya sendiri. Seluruh kendali pemerintahan distir langsung oleh pemimpin demagog.

Bangsa yang tidak dibangun dari dinamika komunikasi dan demokrasi yang transparan akan jauh dari terwujudnya pemerintahan yang baik. Moral bangsa yang rusak selain dilatarbelakangi oleh mewabahnya kiprah pemimpin demagog, juga ditandai oleh lunturnya semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri rakyat. Ini perlu menjadi perhatian serius sebab nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa tidak hanya menjadi milik generasi bangsa sekarang ini, tetapi juga bersinggungan erat dengan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁵ Moral (manusia bermoral) di sini dipahami sebagai relasi atas tiga prinsip kunci, yakni ketahanan sosial antara yang benar dan yang salah (*the social anchoring of right and wrong*), konsep tentang moral (*conceptions of the moral self*) dan interaksi antara pikiran dan pengalaman (*the interplay between thoughts and experiences*). Ellmers, dkk., “The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published From 1940 Through 2017”, dalam *Personality and Social Psychology Review- SAGE Journals*, 23:4 (California: 2019), hlm. 332.

²⁶ Ralph Keyes, *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (New York: St. Martin’s Press, 2004), hlm. 10.

²⁷ Jon Nixon, “Truth in the Time of the Demagogues: Responding to Socio-cultural and Political Instabilities” (paper ilmiah), dalam *Questioning Trajectories: Politics, Policies and Higher Education*, London UK, 14 Maret 2018, hlm. 3.

²⁸ Ralph Keyes, *op. cit.*, hlm. 14.

²⁹ C. W. Lomas, “The Rhetoric of Demagoguery”, dalam *Western Speech*, 25:3 (London: 1961), hlm. 163.

memori antargenerasi, penghormatan terhadap leluhur (pahlawan) dan perjuangan meninggalkan tanda abadi di dunia.³⁰ Banyak orang lebih suka hidup dalam kebohongan dan tidak sadar kalau kebohongan yang massif berdaya menghancurkan politik dan pemerintahan. Di hadapan rakyat yang kritis dan tidak mampu berpikir, kekuasaan demagog akan tampil langgeng sebab rakyat memilih untuk bungkam dan cari aman daripada bersuara dan cari masalah.

4. Penguatan Demokrasi Melawan Demagog

Jikalau demokrasi adalah antitesis dari politik demagogi, maka cara yang paling tepat dalam melawan pemerintahan demagog adalah dengan menguatkan bangunan demokrasi bangsa. Demokrasi yang menjadi benteng pertahanan rakyat (warga negara) yang kokoh dapat menjadi titik tolak dalam mencegah kejahatan politik yang dilancarkan para demagog. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang: apakah penguatan prinsip-prinsip demokrasi yang diusulkan masih mampu dan sukses menjawab persoalan demagog modern yang bergerak secara massif dan tersembunyi dengan cara memanipulasi kebenaran dan membungkus kepentingan pribadi yang terselubung?

Pertanyaan seperti ini harus direfleksikan dan dijawab sejalan dengan situasi sekarang. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah penguatan demokrasi yang diarahkan pada pertumbuhan semangat hukum (konstitusi). Semangat konstitusi merupakan sebuah disiplin yang harus ditegakkan oleh rakyat sebagai subjek dan pejuang demokrasi agar pemimpin rakyat memiliki “kekuasaan yang terbatas” berdasarkan hukum (undang-undang). Itu berarti setiap warga dan pemimpinnya bukan saja setara di hadapan hukum, tetapi juga harus tunduk di bawah hukum.³¹ Selain itu, rakyat juga harus terus mengawasi agar pemimpinnya tidak berubah menjadi tiran yang akan berusaha sekuat tenaga untuk mematikan perspektif dan kritik dari mereka.³² Pemimpin yang menjunjung tinggi konstitusi menjadi ‘agen’ bagi bangsa dan bertindak untuk memenuhi tuntutan dan hak-hak bangsa, dan bukan bertindak atas dasar motivasi pribadi.³³

Penguatan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipaksakan dari luar. Demokrasi hanya dapat tumbuh di dalam: dalam kerja sama pemimpin dengan rakyat untuk memahami hak politik mereka, dalam komunikasi visi mengenai kebebasan politik dan pertukaran gagasan antarmasyarakat, serta dalam toleransi terhadap pandangan-pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Cukup mudah untuk melindungi rakyat dari sosok-sosok semacam ini. Salah satunya adalah dengan terus mengedukasi diri menjelang arus deras informasi politik, mengenal lebih jauh siapa pemimpin yang akan dipilih, tidak terjerat dengan fanatisme, tidak memilih untuk jadi golongan putih (golput), serta selalu bersikap netral dan kritis terhadap informasi yang didapat.

Jika ditelusuri lebih jauh, pemimpin demagog sebenarnya ingin agar para pengikutnya tidak menentang mereka. Pemimpin demagog dan para pendengarnya secara intrinsik saling terhubung. Ia secara bersamaan adalah orang dalam dan orang luar. Ketika berhadapan dengan rakyat (para pendengar), dia akan menggerakkan mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dimiliki atau disukai

³⁰ Catherine Frost, *Morality and Nationalism* (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2017), hlm. 12.

³¹ Fidelis Regi Waton, “Kedaulatan Rakyat” (opini), dalam *Kompas*, 18 Maret 2024, hlm. 6.

³² Mikhael Dua, *op. cit.*, hlm. 37.

³³ Lea Brilmayer, “Moral Significance of Nationalism” (*paper*), 71:1 (University of Notre Dame: 1995). Dapat dibaca dalam <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol71/iss1/2>.

mereka.³⁴ Ia juga menguasai budaya dan kebiasaan mereka dengan alasan supaya ia dapat berhasil mendominasi atau mengontrol informasi publik. Dengan cara-cara demikian, dapat dipastikan dengan jelas bahwa kinerja pemimpin demagog bertentangan dengan pemimpin demokratis yang menjadi cita-cita bersama rakyat.

Atas dasar itu, sudah saatnya kekuasaan pemimpin demagog dibongkar. “Baju demagogi” yang dikenakan pemimpin harus ditanggalkan dan diganti dengan “baju demokrasi”. Dengan “baju yang baru”, pemimpin tidak lagi merasa alergi terhadap kritik yang datang dari rakyat jika ingin menjadikan bangsa ini lebih baik dan ingin membersihkan komunitas yang dipimpinnya dari unsur-unsur destruktif. Namun, rakyat yang mendesak pemimpin demagog untuk beralih dari politik demagogi menuju politik demokratis di sini harus benar-benar terinspirasi dari dorongan masyarakat pada kebutuhan akan kebenaran yang menjadi prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Pada tahap ini, pemimpin yang sudah mengenakan “baju baru” siap mengakomodasi kebutuhan rakyatnya akan hak-hak atas kebenaran.³⁵ Ia akan membuka diri, memandang masalah dan membuat refleksi atas persoalan bangsa. Dengan demikian, ia sudah selangkah lebih jauh dalam menjaga keadaban bangsa.

5. Rakyat versus Demagog: Implikasi Lanjut

Telah diulas sebelumnya bahwa praktik demagogi dalam politik berimplikasi negatif pada proses demokrasi dan stabilitas politik. Hal ini bahkan bisa menciptakan polarisasi politik yang bersifat negatif, mempengaruhi pemilu dengan kampanye yang kurang berkualitas, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik. Dihadapkan dengan persoalan ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bangsa harus menampilkan suara dan tindakan kritisnya. Api demokrasi yang mati karena dipermainkan oleh para demagog harus dinyalakan kembali oleh seluruh warga negara. Untuk itu, ada beberapa implikasi lanjut yang dapat menjadi pegangan bagi rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang demokratis.

Pertama, melatih dan menanamkan semangat berpikir dan kesadaran kritis. Sebagai penjaga demokrasi, rakyat bertugas mengikuti dan mengontrol perjalanan demokrasi serentak memberikan kritik³⁶ pada pemimpin apabila kepemimpinan tersebut menyeleweng dari undang-undang. Sebagai warga negara yang kritis, rakyat juga harus terus waspada kalau para demagog akan selalu bangkit sebab mereka mempunyai bakat untuk mencambuk pengikutnya dengan kebohongan, prasangka, dan rasa menjadi korban yang kuat. Mereka sering kali pandai dalam sindiran dan pembunuhan karakter. Rakyat harus juga menanamkan kesadaran kritis bahwa para pemimpin demagog akan bekerja dengan mengatakan sesuatu yang berbeda kepada kelompok berikutnya yang datang mendekatnya.³⁷ Para pemimpin demagog

³⁴ James Darsey, *The Prophetic Tradition and Radical Rhetoric in America* (New York: NYU Press, 1997), hlm. 202.

³⁵ Felix Baghi, “Hak-hak atas Kebenaran dalam Era Masyarakat Pasca-Kebenaran” (bahan kuliah), dalam *Kelas Rasionalitas Circles Indonesia*, 23 Februari 2024, hlm. 5.

³⁶ Kata “kritik” itu sendiri berakar dalam tradisi filsafat yang kuat. Ditilik dari akar katanya, kritik berasal dari bahasa Yunani *krinein* yang berarti memisahkan atau memerinci. Kritik mengandaikan suatu sikap rasional dalam menilai dan membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang menyimpang dari kebenaran umum. A. Soedarminto (penerj.), *Manusia dan Kritik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1975), hlm. 12.

³⁷ Suatu negara tidak akan berkembang jika tak ada kritik. Negara tanpa kritik akan terus melanggengkan kekuasaan pemimpinnya untuk tetap mempertahankan kedudukan dan kemapanannya. Kelompok pemikir Mazhab Frankfurt membicarakan kritik sebagai salah satu konsep kunci. Mereka mengedepankan kritik untuk menelanjangi ideologi-ideologi tertentu yang mengasingkan manusia individual di dalam masyarakat dan komunitasnya. Zaprul Khan,

sebetulnya tidak terlalu tertarik pada pekerjaan itu sendiri. Mereka hanya tertarik dengan posisi pekerjaan tersebut – hal mana yang membuat mereka seringkali tidak memahami pekerjaannya.

Kedua, melawan narasi fiktif dengan kebenaran. Dengan cara apapun, para demagog akan melancarkan segala macam kebohongan. Kebohongan yang dimaksud di sini bisa berupa konspirasi khayalan yang menghambat kota/desa yang dihuni rakyat, atau juga janji-janji yang tidak dapat ditepati. Sebelum dimulai pemilu, cara terbaik untuk mengalahkan seorang demagog adalah dengan melemahkan efektivitasnya sebelum ia mencalonkan diri. Pemimpin demagog tentu akan membanjiri komunitas masyarakat dengan pelbagai bentuk fiksi. Sebagai rakyat yang kritis, suara fiktif harus dilawan dengan kebenaran. Volume dan cara penyaluran fiksi dari para demagog harus ditanggap balik oleh rakyat dengan kebenaran dalam volume dan cara yang sama pula. Ini penting mengingat kebenaran di sini tidak hanya dilihat sebagai sebuah tuntutan moral, tetapi lebih dari itu, tuntutan bangsa sendiri.³⁸

Ketiga, memberikan pujian (penghargaan) pada pemimpin yang tepat. Perlu diingat, semua pemimpin tidak berwatak demagogis. Beberapa masih setia bekerja dengan benar. Kebenaran politik bersifat menular sehingga perlu diwartakan dan disebarluaskan. Dalam situasi seperti ini, rakyat tak perlu segan-segan untuk memuji para pemimpin demokratis yang telah bekerja dengan benar. Ini penting, sebab pada momen inilah, ketika pemimpin demokratis melakukan hal-hal baik namun tak diakui oleh rakyatnya, para demagog akan dengan enteng mengambil alih hati rakyat. Salman Rushdie mengatakan ini dengan lugas, “*When people stop believing in truth, demagogues come forward.*” Untuk itu, organisasi-organisasi masyarakat perlu memberikan “penghargaan keberanian” yang pantas kepada pemimpin yang bekerja dengan baik. Kenangan-kenangan akan kepemimpinan yang baik dapat ditulis sebagai panduan dan pelajaran untuk pemimpin-pemimpin berikutnya. Dengan mendukung kepemimpinan yang benar secara berkelanjutan, rakyat telah berjuang melawan politik demagogi.

Keempat, memerangi ketidaktahuan diri. Ketidaktahuan sebagai penyakit yang menggerogoti diri harus dilawan jika rakyat ingin melindungi demokrasi. Demagog adalah pembohong yang terampil. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak bisa diterima atau dipercaya begitu saja sebagai kebenaran, tetapi harus diverifikasi. Upaya filterisasi atas apa yang mereka katakan dan berani mengkritik ketika mereka salah harus tetap dilakukan. Kaum akademisi/intelektual dan mahasiswa pemilih-pemilih muda juga diajak agar harus lebih pintar dari pemilih sebelumnya dengan menahan godaan untuk mengikuti secara membabi-buta pemimpin politik manapun yang mengaku sebagai “penyelamat rakyat”. Hanya dengan cara ini, rakyat dapat bergerak mencegah awetnya politik demagogi di Indonesia, dan membangkitkan kembali semangat demokrasi yang mati.

Terhadap semua itu, rakyat perlu sadar bahwa obat terbaik dari segala bentuk ketidaktahuan, emosi, dan ketidakpercayaan rakyat adalah pendidikan. Rakyat harus membekali diri (dan dibekali) dengan pendidikan politik yang mumpuni jika ingin melindungi demokrasi dari polarisasi propaganda dari demagog yang dapat memotivasi rakyat untuk saling membenci dan mengkambinghitamkan pihak lain.³⁹ Rakyat juga perlu mendidik diri sendiri dengan mengonsumsi media secara kritis, serentak

Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 299. Dalam kehidupan berbangsa, aktivitas mengkritik dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan komunikasi yang transparan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

³⁸ Frano Kleden, “Kejujuran dalam Politik” (opini), dalam *Pos Kupang*, 11 Juli 2017, hlm. 4.

³⁹ Brian L. Ott dan Greg Dickinson, *The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage* (New York: Routledge, 2019), hlm. 47.

berusaha untuk benar-benar memahaminya. Selanjutnya, diskusi politik dan pemikiran kritis-konstruktif, debat politik yang terinformasi, kebijakan yang transparan, media yang terbuka dan menyuarakan kebenaran membentuk solusi ini. Rakyat Indonesia yang terdidik, tercerahkan, dan terinformasi adalah salah satu cara paling pasti untuk meningkatkan kesehatan demokrasi.

6. Penutup

Penyelamat demokrasi adalah rakyat sendiri. Kehadiran pemimpin demagog dalam konteks demokrasi Indonesia adalah situasi serius yang perlu diwaspadai oleh rakyat sebab jalan hidup pemimpin demagog berlawanan dengan sistem demokrasi sebagai spirit yang menjiwai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemimpin demagog dan politik demagoginya perlu ditolak. Cara melawan kepemimpinan demagog adalah dengan melancarkan kritik yang terus-menerus terhadap kiprah kepemimpinan, termasuk program-program dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Pesan-pesan kritik yang bebas dan terbuka dalam demokrasi juga harus dikuatkan untuk mengontrol perjalanan dan sepak terjang kepemimpinan sang demagog. Selanjutnya, pendidikan politik yang baik, kebebasan berpendapat yang dijamin, partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan faktor penting dalam melawan politik demagogi dan membangun sistem politik yang inklusif dan adil. Demi tercapainya transformasi sosial-politik demi kemaslahatan bersama dan terwujudnya sistem demokrasi yang sehat, rakyat dan pemimpin harus terbuka dan bekerja sama. Dengan cara-cara demikian, mereka (rakyat dan pemimpin) sudah selangkah lebih maju dalam menjaga marwah dan keadaban bangsa.

Daftar Rujukan

Baghi, Felix. “Hak-hak atas Kebenaran dalam Era Masyarakat Pasca-Kebenaran” (bahan kuliah), dalam *Kelas Rasionalitas Circles Indonesia*, 23 Februari 2024.

Bolo, Andreas Doweng. “Masyarakat Jejaring (Network Society) Sebuah Upaya Penguatan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilihan Umum 2024”, dalam *Jurnal Pembedaan Pancasila*, Vol. 3, No. 1, Jagakarsa: 2023.

Darsey, James. *The Prophetic Tradition and Radical Rhetoric in America*. New York: NYU Press, 1997.

Dua, Mikhael. “Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog”, dalam *Jurnal Etika Sosial Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Vol. 14, No. 1, Jakarta: Juli 2009.

Ellmers, dkk., “The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published From 1940 Through 2017”, dalam *Personality and Social Psychology Review – SAGE Journals*, Vol. 23, No. 4, 2019.

Frost, Catherine. *Morality and Nationalism*. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2017.

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Haryatmoko, “Politik Identitas dan Keadaban Publik” (opini), *Kompas*, 6 Desember 2022.

Kebung, Kondrad. *Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Penerbit OBOR, 1997.

Keyes, Ralph. *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press, 2004.

Kleden, Frano. "Kejujuran dalam Politik" (opini), dalam *Pos Kupang*, 11 Juli 2017.

Kleden, Paulus Budi. "Pemilu 2009 dan Upaya Demokratisasi". *Jurnal Ledalero*, Vol. 7, No. 2, Ledalero: Desember 2008.

Kuncahyono, Trias. "Agitator bin Demagog" (opini), *Kompas*, 24 September 2019.

Lomas, C. W. "The Rhetoric of Demagoguery", dalam *Western Speech*, Vol. 25, No. 3, London: 1961.

Majalah Tempo edisi 18 Februari 2024.

Miller, Roberts. *Demagoguery and Democracy*. New York: The Experiment, 2017.

Mulyadi, Mohammad. *Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Nixon, Jon. "Truth in the Time of the Demagogues: Responding to Socio-cultural and Political Instabilities" (paper ilmiah), dalam *Questioning Trajectories: Politics, Policies and Higher Education*, London UK, 14 Maret 2018.

Nugroho, Yanuar. "Ambruknya Keadaban Publik Kita" (opini), *Kompas*, 6 Maret 2024.

Ott, Brian L. dan Greg Dickinson. *The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage*. New York: Routledge, 2019.

Pureklolon, Thomas Tokan. "Kekuasaan, Keadilan, dan Partai Politik" (opini), *Media Indonesia*, 5 Maret 2024.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Scott, Margaret. "Indonesia's Corrupted Democracy", dalam *The New York Review of Books*, 4 April 2024.

Signer, Michael. *Demagogue: The Fight to Save Democracy from its Worst Enemies*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Soedarminto, A. (penerj). *Manusia dan Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1975.

Tahir, Masnun. "Demagogi dan Kekerasan Agama dalam Sistem Demokrasi di Indonesia", dalam *Analisis*, Vol. 11, No. 1, Juni 2011.

12 | **Politik Demagogi, Matinya Kebenaran, dan Upaya Penguatan Demokrasi**
(Fransiskus Bala Kleden)

Warta Timur, 11 Januari 2014.

Waton, Fidelis Regi. “Kedaulatan Rakyat” (opini), *Kompas*, 18 Maret 2024.

Wattimena, Reza A. A. *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

Zaprul Khan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.